

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan Perangkat Daerah khususnya untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Perencanaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin...

Tenggarong, 21 Maret 2025.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	65
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	67
BAB V PENUTUP	85

TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2024	15
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	32
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	48
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara	62
Tabel 2.6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027	70

BAB I

PENDAHULUAN



Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, evaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 62 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dokumen perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan :

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rancangan Rencana Kerja (RENJA), maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA).

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 sebesar 202,99 % (sangat tinggi) sedangkan target Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 33.667.300.885,00 dan Realisasinya sebesar Rp. 30.503.105.001,00 atau sebesar 90,60 % (sangat tinggi), serta diproyeksi untuk realisasi capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 dapat terealisasi 100 %.

Realisasi target capaian urusan Kearsipan tentang sasaran renstra 'Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional' dengan indikator 'Tingkat ketersediaan arsip' tidak tercapai karena kurang didukung data dan informasi dalam menentukan target yang menyesuaikan dengan metode penilaian Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) serta sedangkan Urusan Perpustakaan target sasaran renstra Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat dengan indikator 'Indeks Pembangunan Literasi masyarakat' telah mencapai target, sehingga diharapkan peningkatan pembangunan gedung perpustakaan desa dan sarana prasarana perpustakaan sehingga pengunjung dapat lebih meningkat di tahun 2025.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan/subkegiatan yang realisasinya memenuhi target kinerja hasil/keluaran karena telah sesuai yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah kerjasama, koordinasi dan konsolidasi antara semua pemangku kepentingan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yakni capaian indikator program kearsipan prosentase SKPD tentang tata kelola arsip perangkat daerah

83,05 % dan Indeks Pembangunan Literasi masyarakat dengan nilai 62,52;

4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran sub kegiatan yang perlu diambil untuk mempertahankan hasil capaian adalah perlu menjaga kerjasama yang baik serta selalu berkoordinasi dan berkonsolidasi berjenjang pada perangkat daerah.

Tabel TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra- PD s/d Tahun 2024
Kabupaten kutai kartanegara

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja -PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	95.20	72	95.20	132	73		
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	36	12	12	100	12		
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	9	3	3	100	3		
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	3	1	1	100	0		

2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	25	15	5	5	100	5		
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	570	285	95	95	100	95		
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	3	1	1	100	1		
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	9	3	3	100	3		
2.23.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	3	1	1	100	1		
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5	3	1	1	100	1		

2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	320	151	1	0	0	8		
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	165	98	1	1	100	1		
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	411960	164784	1	1	100	1		
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	29900	15160	1	1	100	1		
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	10	1	1	100	1		
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1224	600	200	200	100	200		
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9000	4500	1	1	100	1		
2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	1	1	100	1		

2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2	4	2	2	100	2		
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590	46090	46590	46590	100	46590		
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6	4	1	1	100	2		
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150	259	34	34	100	100		

2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58	58	58	58	100	58		
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1,800	300	5	5	100	4		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100	50	65	65	100	95		
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	5000	1000	1,000	1000	100	1,000		
2.24.03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000	2000	1000	1000	100	1000		

2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	2100	500	500	500	100	500		
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2100	500	500	500	100	0		
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	5000	1000	1,000	1000	100	1,000		
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2500	500	500	500	100	2		

2.24.04	PROGRAM PERIJINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100		
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	51	24	12	12	100	12		
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan daftar dan Penetapan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	51	24	12	12	100	12		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator *Input* (masukan), *Output* (keluaran) dan *outcome* (hasil).

Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
- Indikator Keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
- Indikator Hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan *input* sebaiknya untuk mendapatkan *output* secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan *outcome* dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena *output* merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. Namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian atau penilaian.

Ditambahkan lagi dengan seluruh program/kegiatan ditahun 2026 belum dapat diidentifikasi dikarenakan sedang berjalan dan seperti biasa tentunya sedikit ada perubahan-perubahan di pertengahan tahun. Melihat kondisi yang ada ini maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya menjabarkan program kerja yang sedang berjalan atau dalam proses pengerjaan.

A. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan data-data yang ada dan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 6 (Enam) program dan 20 Kegiatan di tahun 2024 hasil realisasi keseluruhan diangka 90,60 %. Hal ini tentu merupakan proses pekerjaan yang sangat baik. Dalam hal ini pula tentunya program-program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nanti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sejalan dengan program pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan termaktud dalam RKPD di tahun 2026. diharapkan pula tentunya ada peningkatan dan perbaikan-perbaikan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil tersebut Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Analisa keuangan disini sama halnya dengan analisa kinerja output, artinya pengukuran serapan anggaran keuangan

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan, Berakhlak, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

Tabel TC.30.
Pencapaian Kinerja PelayananDinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
		Standar Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	62.50	63.30	63.50	64.00	52.50	62.52	68.17	—	Realisasi capaian kinerja tahun 2024 telah melebihi target
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah		Persentase PD yang menerapkan Pengelolaan arsip kategori B	50.00	75.00	100.00	100.00	50.00	83.92	93.22	—	Realisasi capaian kinerja tahun 2024 telah melebihi target
3	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat	14	15	14	17	20.15	56.94	62.52	—	Realisasi capaian kinerja tahun 2024 kurang tercapai karena salah satu unsur perhitungannya tidak memenuhi target
4	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional		Tingkat Ketersediaan Arsip	85.00	90.00	95.00	100.00	75.00	75.00	83.05	—	Realisasi capaian kinerja tahun 2024 kurang tercapai karena salah satu instrumen perhitungannya tidak memenuhi target

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Pencapaian Tingkat Kinerja Pelayanan

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, khususnya *Cakupan OPD yang menerapkan Tingkat ketersediaan arsip* terlihat dari target renstra Pemerintah Daerah dan kemudian dijabarkan dengan realisasi capaian dimana untuk tahun 2024 target renstra sebesar 90 % realisasi capaian sebesar 83.05 % dimana hal tersebut belum memenuhi target renstra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk tahun 2025 sebesar 95 % dan diharapkan realisasi untuk tahun 2025 bisa tercapai sesuai target dari Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat target renstra sebesar 15 realisasi capaian sebesar 62,52 dimana hal tersebut sudah memenuhi target renstra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun tingkat pelayanan dengan parameter pengunjung perpustakaan pada tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya program kegiatan tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan fasilitas perpustakaan yang lebih baik dari tahun berjalan seperti, *pembuatan kartu anggota, penelusuran buku dengan komputerisasi* dan efektifnya perpustakaan keliling serta perpustakaan digital (ikukar).

Untuk proyeksi tahun 2025 dengan parameter pengunjung perpustakaan juga mengalami peningkatan, Melihat dari kondisi yang ada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meyakinkan adanya peningkatan yang lebih baik dari target yang ditentukan, dengan meningkatkan

kinerja sumber daya manusia serta membuat inovasi-inovasi yang baru.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1) Permasalahan Pokok Urusan Perpustakaan

Rendahnya budaya baca masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan permasalahan pokok yang terjadi pada urusan Perpustakaan, hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja pembinaan dan pengelolaan perpustakaan serta belum optimalnya dilaksanakannya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Adapun yang menjadi masalah pada urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. **Keterbatasan Akses:** Perpustakaan mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya atau koleksi yang diperlukan oleh pengguna karena keterbatasan dana atau kebijakan pengelolaan.
2. **Kualitas Koleksi:** Koleksi yang tersedia mungkin tidak memenuhi kebutuhan atau minat pengguna, atau kualitasnya mungkin rendah.
3. **Teknologi dan Sistem Manajemen Perpustakaan (SMP):** Kekurangan dalam sistem manajemen perpustakaan atau kurangnya integrasi dengan teknologi modern bisa menjadi kendala. Ini bisa termasuk sistem katalog yang tidak efisien, perangkat lunak yang usang, atau infrastruktur IT yang kurang memadai.
4. **Infrastruktur Fisik:** Fasilitas fisik perpustakaan mungkin tidak memadai, termasuk ruang yang terlalu kecil, kurangnya fasilitas seperti meja dan kursi yang

cukup, atau kurangnya ruang untuk acara atau program.

5. **Pengelolaan Koleksi:** Koleksi mungkin tidak dikelola dengan baik, termasuk masalah seperti kurangnya pembaruan, inventarisasi yang tidak tepat, atau kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pengguna.
6. **Kurangnya Promosi dan Pendidikan Pengguna:** Pengguna mungkin tidak menyadari sumber daya atau layanan yang tersedia di perpustakaan, atau mungkin tidak tahu cara mengakses atau memanfaatkannya.
7. **Kurangnya Keberlanjutan:** Perpustakaan mungkin mengalami kesulitan keuangan atau keberlanjutan jangka panjang karena kurangnya pendanaan atau dukungan dari pemerintah atau lembaga lainnya.
8. **Ketidaksetaraan Akses:** Beberapa anggota masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses perpustakaan karena keterbatasan fisik atau keuangan, atau karena kurangnya aksesibilitas bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah.
9. **Kurangnya Keterlibatan Komunitas Dalam Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial:** Kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam program-program perpustakaan atau kegiatan-kegiatan sosial juga bisa menjadi masalah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perpustakaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas bagi pengguna.

2) **Permasalahan Pokok Urusan Kearsipan**

Masalah yang terkait dengan urusan kearsipan juga dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa akar permasalahan umum dalam pengelolaan arsip.

Adapun yang menjadi permasalahan pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. **Kurangnya Kebijakan dan Prosedur:** Ketersediaan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan arsip sangat penting. Kurangnya kebijakan yang tepat dan prosedur yang disusun dengan baik dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan arsip, termasuk masalah seperti penyimpanan yang tidak teratur, pemeliharaan yang tidak memadai, dan kesulitan dalam mengakses arsip yang diperlukan.
2. **Kurangnya Sumber Daya:** Kurangnya anggaran, personel, atau infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola arsip dengan efektif dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kurangnya ruang penyimpanan yang memadai, kurangnya pelatihan staf, dan kurangnya perangkat lunak atau teknologi yang diperlukan.
3. **Teknologi dan Sistem Manajemen Arsip (SMA):** Teknologi yang usang atau kurangnya implementasi sistem manajemen arsip (SMA) yang tepat dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatur, mengelola, dan mengakses arsip dengan efisien. Sistem yang tidak terintegrasi dengan baik atau tidak memadai

juga dapat menyebabkan masalah dalam pencarian dan pengambilan arsip.

4. **Kurangnya Keterampilan dan Kesadaran:**

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan kurangnya keterampilan dalam melakukan tugas-tugas pengelolaan arsip juga dapat menjadi masalah. Pelatihan yang kurang atau kurangnya kesadaran akan kebijakan dan prosedur yang ada dapat menyebabkan kesalahan atau kecenderungan untuk mengabaikan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip.

5. **Penyimpanan Fisik yang Tidak Tepat:** Penyimpanan arsip fisik yang tidak terorganisir dengan baik atau tidak memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan dan mengakses dokumen yang diperlukan, serta risiko kerusakan atau kehilangan arsip akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai (Belum adanya Depot Arsip).

6. **Masalah Kepatuhan dan Privasi:** Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kebijakan privasi, seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa, atau ketidakpatuhan terhadap standar-standar arsip yang diatur oleh lembaga pemerintah atau industri tertentu dapat menyebabkan risiko hukum dan reputasi bagi organisasi.

7. **Masalah Penghapusan:** Kebijakan penghapusan yang tidak jelas atau tidak diterapkan dengan konsisten dapat menyebabkan penumpukan arsip yang tidak perlu, meningkatkan biaya penyimpanan, dan menyulitkan pengelolaan arsip secara keseluruhan.

8. Perubahan Teknologi dan Kebutuhan Bisnis:

Perubahan dalam teknologi atau kebutuhan bisnis dapat menyebabkan tantangan baru dalam pengelolaan arsip, termasuk integrasi data dari berbagai sumber atau format, serta kebutuhan untuk mengelola arsip digital dengan efektif.

9. Risiko Bencana: Kurangnya perencanaan mitigasi risiko bencana atau kurangnya langkah-langkah pemulihan bencana yang sesuai dapat meningkatkan risiko kehilangan arsip penting akibat bencana alam atau insiden lainnya.

10. Masalah Kepemimpinan dan Budaya Organisasi:

Kurangnya dukungan atau kesadaran dari puncak kepemimpinan, serta budaya organisasi yang tidak mendukung praktik pengelolaan arsip yang baik, juga dapat menjadi hambatan dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan arsip.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perangkat daerah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan arsip mereka, serta mengembangkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan praktik pengelolaan arsip dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Strategis Program Nasional/Internasional, SPM dan MDGS.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021– 2026 adalah mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera

dan Berbahagia, untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Adapun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masuk pada misi :

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.

Dampak terhadap Capaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional :

1. Tertib arsip di lingkungan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), Perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan/ Tokoh Nasional;
2. Peningkatan gemar membaca;
3. Meningkatkan penataan dan penguatan organisasi kearsipan;
4. Penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;

6. penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan;
8. Peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK melalui perpustakaan digital;
9. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar;
10. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

Tantangan Penyelenggaraan Urusan Kearsipan :

- **Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Kearsipan:** Banyak organisasi atau individu yang kurang menyadari pentingnya kearsipan dan dampak positifnya terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. Akibatnya, sering kali kurangnya dukungan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk kegiatan kearsipan.
- **Kurangnya Sumber Daya:** Penyelenggaraan kearsipan membutuhkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang cukup. Tantangan ini dapat berupa keterbatasan anggaran untuk pelatihan staf, peralatan dan infrastruktur kearsipan yang memadai, serta kurangnya personel yang terlatih dalam manajemen arsip.
- **Teknologi dan Sistem Informasi yang Usang:** Banyak organisasi masih mengandalkan sistem kearsipan tradisional yang belum diperbarui atau diintegrasikan dengan teknologi

informasi modern. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas, pengelolaan, dan keamanan arsip.

- **Ruang Fisik yang Terbatas:** Penyimpanan fisik arsip dapat menjadi masalah, terutama di organisasi yang memiliki ruang kantor terbatas. Keterbatasan ruang dapat menyebabkan kesulitan dalam menyimpan dan mengelola arsip secara efisien.
- **Ketidakpatuhan Terhadap Kebijakan dan Standar Kearsipan:** Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang kebijakan dan standar kearsipan yang berlaku dapat menyebabkan ketidakpatuhan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kehilangan atau penggunaan arsip yang tidak efisien.
- **Kesulitan dalam Pengelolaan dan Retensi Data Elektronik:** Dengan meningkatnya penggunaan data elektronik, organisasi sering kali menghadapi kesulitan dalam pengelolaan dan retensi data elektronik. Tantangan ini termasuk penentuan metode penyimpanan yang aman dan kebijakan retensi data yang efektif.
- **Risiko Keamanan dan Privasi:** Perlindungan terhadap keamanan dan privasi data arsip sangat penting, terutama dengan meningkatnya ancaman keamanan *cyber*. Tantangan dalam menjaga keamanan dan privasi data arsip meliputi kebocoran data, akses yang tidak sah, dan penyalahgunaan data.
- **Kehilangan dan Kerusakan Arsip:** Kerusakan atau kehilangan arsip dapat terjadi karena berbagai faktor seperti bencana alam, kebakaran, banjir, atau kesalahan manusia. Tantangan ini menekankan perlunya strategi pemulihan bencana dan perlindungan arsip yang efektif.
- **Keterbatasan dalam Aksesibilitas Informasi:** Kearsipan yang tidak terorganisir dengan baik atau kurangnya

metadata yang memadai dapat menghambat aksesibilitas informasi yang penting dan menghambat produktivitas organisasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam manajemen kearsipan, termasuk investasi dalam pelatihan staf, pengembangan infrastruktur teknologi, penerapan kebijakan yang jelas, dan pematuhan terhadap standar kearsipan yang berlaku.

Tantangan Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan :

1. **Keterbatasan Anggaran:** Banyak perpustakaan mengalami keterbatasan anggaran, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk memperbarui koleksi, memperbaiki infrastruktur, atau menyediakan layanan tambahan.
2. **Perubahan Teknologi:** Perkembangan teknologi terus berubah dengan cepat, mempengaruhi cara orang mengakses dan menggunakan informasi. Perpustakaan harus terus mengikuti perkembangan ini untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna.
3. **Perubahan Kebutuhan Pengguna:** Kebutuhan pengguna perpustakaan dapat berubah seiring waktu. Perpustakaan harus mampu menyesuaikan layanan dan koleksinya untuk memenuhi kebutuhan dan minat yang berkembang dari pengguna mereka.
4. **Persaingan dengan Sumber Informasi Digital:** Sumber informasi digital seperti internet dan platform daring menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi. Perpustakaan harus berinovasi dalam menyediakan nilai tambah yang berbeda untuk tetap relevan bagi pengguna.
5. **Isu Literasi Informasi:** Keterampilan literasi informasi menjadi semakin penting di era digital ini. Perpustakaan mungkin

dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan literasi informasi di antara pengguna mereka.

6. **Diversifikasi Kebutuhan Pengguna:** Pengguna perpustakaan berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki kebutuhan yang beragam. Menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan semua pengguna dapat menjadi tantangan tersendiri.
7. **Aksesibilitas dan Inklusivitas:** Perpustakaan harus memastikan bahwa layanan dan fasilitas mereka dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas dan kelompok-kelompok yang kurang mampu.
8. **Pemeliharaan dan Pengembangan Koleksi:** Memelihara koleksi perpustakaan yang relevan dan bermanfaat sambil menghadapi keterbatasan ruang dan anggaran merupakan tantangan tersendiri.
9. **Pembangunan Sumber Daya Manusia:** Ketersediaan staf yang terlatih dan berkualitas menjadi kunci dalam penyelenggaraan perpustakaan yang efektif. Mengembangkan staf dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan modern juga merupakan tantangan.
10. **Pengelolaan Data dan Privasi:** Perpustakaan sering menyimpan informasi sensitif tentang pengguna mereka. Menjaga privasi dan keamanan data menjadi tantangan penting dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang holistik, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta kreativitas dan fleksibilitas dalam menjawab perubahan lingkungan yang dinamis.

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- **Peluang Penyelenggaraan Urusan Kearsipan :**

- Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik nomor 82 Tahun 2012 semakin mengukuhkan peranan/arti penting arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta Kearsipan di dunia Internasional memberi ruang yang lebih luas dalam penerapan Teknologi dan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- Ketersediaan arsip yang *autentik* dan *reliable* merupakan keharusan dalam akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju *Good Governance*.

- **Peluang Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan :**

- Paradigma global (Pola/Pandangan Umum) dalam penyelenggaraan informasi dan Ilmu Pengetahuan memberikan peluang bagi untuk melakukan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat Informasi, edukasi, penelitian, reservasi dan rekreasi secara profesional dan berkelanjutan dan harus berkembang berbasis Teknologi Informasi;

- Kewajiban mengembangkan minat baca, menyediakan Koleksi bacaan, memberikan bahan bacaan yang menjadi topik hangat dimasyarakat, dan melestarikan Budaya setempat (*local culture*) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- Perpustakaan sebagai Agen perubahan perlu memberikan ruang untuk aktualisasi dan apresiasi masyarakatnya serta memberikan sarana untuk aktivitas akademik seperti diskusi, seminar dan workshop dan kegiatan kultural lainnya.

2.3.5 Formulasi Isu – Isu Kearsipan dan Perpustakaan

1. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk segera menyusun dan menetapkan empat pilar instrumen pengelolaan arsip dinamis berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Meminta Kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB untuk menyediakan formasi Arsiparis bagi kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan analisa kebutuhan beban kerja kearsipan di lingkungannya.
3. Mendorong Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung penguatan kelembagaan, anggaran dan SDM Semua jenis perpustakaan agar peran dan fungsi perpustakaan dalam perbaikan kualitas pelayanan perpustakaan sebagai hak masyarakat semakin maksimal.
4. Mendorong seluruh pemangku kepentingan bidang perpustakaan agar penguatan literasi sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas SDM Indonesia Kutai Kartanegara yang termaktub dalam RPJPD Tahun 2025-

2045 agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memasukkan penguatan budaya literasi sebagai arah kebijakan dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

5. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan revitalisasi dan pembangunan infrastruktur fasilitas layanan perpustakaan sebagai institusi layanan publik yang terbuka dan inklusif sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang didukung melalui skema pendanaan APBD setiap tahun.
6. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya penguatan budaya literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan dan diseminasi bahan bacaan terapan dengan memanfaatkan TIK dan sarana dan prasarana lainnya secara luas, serta mendorong masyarakat terus melakukan gerakan sosial mendukung aktivitas pegiat literasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Program dan Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan harus mengarah pada upaya peningkatan literasi masyarakat dan tertib arsip di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kerangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara holistik, integratif dan spasial dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis tertib arsip.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) 2026 tentu harus dengan tingkat analisa dan evaluasi yang komprehensif mulai dari *telaahan terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah tahun lalu dengan Renstra Pemerintah Daerah, model analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu apa yang didapat sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi*, melihat dari

interpretasi yang ada maka untuk mendukung Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2026 perlu membuat rancangan awal RKPD. Tentunya dalam penyusunan program kegiatan ditahun 2026, harus mengacu dari renstra yang ada ditambah dengan masukan dari masyarakat.

Terhadap rancangan RKPD tahun 2026 yang telah disusun, sudah melalui hasil telaahan yang komprehensif dari pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan, Berakhlak, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

*RANCANGAN RENJA DIARPUS
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026*

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	256,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	250,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150,000,000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 laporan	50,000,000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 laporan	250,000,000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 laporan	50,000,000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	11,020,127,230	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14	11,328,286,537	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	10,840,127,230	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	11,128,286,537	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	80,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	150,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Laporan	22,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Laporan	137,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25,000,000	

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	82,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	149,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1,075,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	130 Paket	104,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	300,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Inovasi	12 Orang	45,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Inovasi	25 Orang	400,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	375,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	518,194,374	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	4,116,000,000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	22,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	124,057,054	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,516,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	36,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	400,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	82390 Paket	22,050,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5580 Dokumen	23,814,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	350,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19,773,320	Penyediaan Bahan/Material	Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	400,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	180,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	550,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	90,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	250,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 paket	300,000,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	967,521,836	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	4,110,431,657	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1,320,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	586,091,705	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	674,601,836	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,524,339,952	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	Jumlah Barang Milik Daerah	218	130,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	Jumlah Barang Milik Daerah	140	1,700,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	40,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	300,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	300,000,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit	22,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	300,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	800,000,000	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kukar	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	46.98	2,130,000,000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kukar	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	11.09	7,350,000,000	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.64	760,000,000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	7.88	3,450,000,000	
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kukar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	75,000,000	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kukar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	250,000,000	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Unit	100,000,000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	1,000,000,000	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	185,000,000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	250,000,000	

	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	25,000,000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	200,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34 Orang	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	300,000,000	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	50,000,000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kukar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590 Eksemplar	100,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kukar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	52965Eksemplar	500,000,000	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250 Eksemplar	75,000,000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1500 Eksemplar	250,000,000	

	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	75,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Perpustakaan	500,000,000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5 kali	1,370,000,000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5 kali	3,900,000,000	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kukar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	50,000,000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kukar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	150,000,000	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3Perpustakaan	75,000,000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3Perpustakaan	300,000,000	
	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1,050,000,000	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Perpustakaan	3,000,000,000	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kukar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2 Orang	70,000,000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kukar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	200,000,000	

	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3Perpustakaan	75,000,000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 Perpustakaan	250,000,000	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kukar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	50,000,000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kukar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	3 Lokus	300,000,000	
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	kukar	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100%	320,000,000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	kukar	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100%	1,050,000,000	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Naskah Kuno	5 Naskah	180,000,000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Naskah Kuno	36	600,000,000	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	80,000,000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	200 Orang	400,000,000	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kukar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	100,000,000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kukar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	200,000,000	

	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	300 Eksemplar	140,000,000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	6553 Eksemplar	450,000,000	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300 Eksemplar	90,000,000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2000 Eksemplar	300,000,000	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300 Eksemplar	50,000,000	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	2000 Eksemplar	150,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kukar	Persentase arsip yang dikelola	100	800,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kukar	Persentase arsip yang dikelola	100	2,000,000,000	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	68101 Berkas	450,000,000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	493685 Berkas	1,200,000,000	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	75,000,000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100000 Berkas	200,000,000	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	75,000,000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100000 Berkas	200,000,000	

	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	300,000,000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	800,000,000	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	24500 Arsip	150,000,000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	60779 Arsip	400,000,000	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25500 Arsip	150,000,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50Arsip	400,000,000	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58 OPD	200,000,000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	59 OPD	400,000,000	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	200,000,000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	7 Laporan	400,000,000	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kukar	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an	100%	500,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kukar	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an	100%	625,000,000	

	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	1000 Arsip	100,000,000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	500 Arsip	150,000,000	
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	100,000,000	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	150,000,000	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	500 Berkas	75,000,000	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	500 Berkas	100,000,000	
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	75,000,000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	100,000,000	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kukar	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan sesuai dengan NSPK	1000	150,000,000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kukar	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan sesuai dengan NSPK	501	200,000,000	

	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Daftar	75,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	100,000,000	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	75,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	100,000,000	
19	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500 Arsip	100,000,000	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500 Arsip	100,000,000	
	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	100,000,000	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	100,000,000	
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	500 Arsip	75,000,000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	1	75,000,000	

	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	75,000,000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Daftar	75,000,000	
6	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kukar	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	75,000,000	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kukar	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	150,000,000	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	12 Arsip	75,000,000	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	43 Izin	150,000,000	
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	75,000,000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	10 Arsip	150,000,000	
JUMLAH				17,312,081,807		JUMLAH				34,641,718,194	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program Kegiatan diperoleh dari rapat keseluruhan Bidang/Sub Bidang Internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara. Setelah hasil dari rapat kerja dicapai kemudian dituangkan kedalam rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tahun 2026. Untuk hal penelaahan usulan program masyarakat kegiatan masyarakat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentu memiliki beberapa program kegiatan, khususnya tentang Program Pembinaan Perpustakaan yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sehingga hal tersebut menjadikan rujukan adanya penambahan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Untuk memastikan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dapat masuk dan terwakilkan melalui Program Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026, maka difinalisasi melalui Musrenbang di Kecamatan. Usulan program/kegiatan dari masyarakat meliputi 21 usulan Pembangunan Tempat/ Gedung Perpustakaan Kelurahan/ Desa dan 10 usulan Sarana Prasarana Perpustakaan digital guna menunjang pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat.

Pemenuhan usulan program/kegiatan masyarakat sangat penting sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan berbudaya baca.

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah Perangkat Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut	1	Belum tersedianya sarana prasarana perpustakaan desa dimana sangat di butuhkan untuk anak-anak maupun warga setempat untuk menambah pengetahuan
		Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan digital bagi Desa/Kelurahan
		Desa Kersik Kecamatan Marang Kayu	1	Desa Kersik belum memiliki Sarana dan Prasarana perpustakaan digital
		Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman	1	Dibutuhkannya sarana dan Prasarana penunjang kegiatan perpustakaan
		Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai	1	Bantuan Sapras Perpustakaan Digital Desa Kayu Batu
		Desa Perian Kecamatan Muara Muntai	1	Belum adanya perpustakaan di desa sehingga daya tarik dalam membaca juga kurang
		Kelurahan Sanga-sanga Dalam Kecamatan sanga-sanga	1	Bangunan Ada, Fasilitas Pendukung Belum Ada
		Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang	1	Pembangunan rumah digital di perpustakaan desa bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan layanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi digital

		Desa Rampak Lambur Kecamatan Tenggarong	1	Desa telah memiliki bangunan perpustakaan, namun masih memerlukan sarana prasarana guna menunjang perpustakaan digital
		Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Sebagai salah satu Desa terbaik dalam digitalisasi desa, Bhuana Jaya perlu mengembangkan potensi yang ada dengan mengadakan sarana dan prasarana perpustakaan digital desa
2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		21	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun	1	Gedung Rusak Berat
		Desa Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota Bangun	1	tidak ada perpustakaan desa
		Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	1	Belum ada gedung perpustakaan
		Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun	1	Belum ada Perpustakaan di Desa
		Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Gedung perpustakaan desa belum ada
		Desa Sumber Sari Kecamatan Kota Bangun Darat	1	Belum memiliki perpustakaan desa. Melihat tingginya minat baca anak-anak dan masyarakat maka perpustakaan tersebut sangat diperlukan

		Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu	1	Belum ada gedung khusus untuk perpustakaan desa
		Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu	1	Tidak adanya perpustakaan menyebabkan literasi membaca sangat kurang. Terlebih jika terdapat perutakaan desa maka akan lebih meningkatkan IDM Desa
		Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu	1	Tidak ada Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan Sebagai Tempat/Sumber Layanan Informasi Utama adalah layanan informasi tentang kehidupan dan sejarah, layanan informasi umum, sebagai pusat belajar mengajar masyarakat dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat
		Desa Kersik Kecamatan Marang Kayu	1	Belum Memiliki Gedung Perpustakaan
		Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak	1	Kondisi gedung sudah tua dan banyak kerusakan
		Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak	1	Sebagai tempat/sumber layanan informasi, tempat belajar masyarakan dalam meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat

		Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman	1	Kurang nya Sarana dan Prasarana Pendukung Kurang nya Perhatian Masyarakat akan efek rendah nya minat baca generasi muda
		Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis	1	Kurangnya tempat baca yang terbukan untuk masyarakat menjadikan masyarakat kurang minat untuk membaca yang tujuannya mempercerdas baca masyarakat
		Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat	1	Belum tersedianya gedung perpustakaan untuk minat baca di lingkungan kelurahan
		Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga- sanga	1	Kurangnya Fasilitas Umum yaitu Pembangunan Perpustakaan
		Desa Giri Agung Kecamatan Muara Kaman Sebulu	1	Untuk meningkatkan Perpustakaan Desa Giri Agung perlu Bangunan gedung Perpusytakaan Desa Giri Agung yang standar maksimal guna dapat menampung Koleksi dan Pengunjung lebih banyak dan menjadi referensi pengetahuan masyarakat dan Pelajar yang ada

		Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang	1	Dana yang tersedia Tidak Mencukupi untuk melakukan pembangunan
		Desa Bukit Biru Kecamatan Tenggarong	1	Belum ada tersedianya gedung perpustakaan
		Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang	1	Minat baca masyarakat Indonesia masih rendah harus diperjuangkan dengan maksimal. termasuk pembangunan perpustakaan desa
		Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu	1	Pembangunan rumah digital di perpustakaan desa bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan layanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi digital

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional memberikan implikasi kepada Daerah untuk melaksanakan pendekatan baru dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah akan dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Lembaga Kearsipan Daerah dan sebagai penyelenggara perpustakaan Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan tata kelola kearsipan di daerah dan peningkatan budaya baca masyarakat.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam pengelolaan dan penataan kearsipan dalam gerakan nasional sadar tata arsip (GNSTA) telah menjadi inspirasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memprioritaskan pengelolaan dan penataan arsip daerah, sedangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dalam meningkatkan nilai budaya baca masyarakat melalui Gerakan Literasi untuk kesejahteraan telah memberi semangat untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat serta layanan literasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029, sebagai berikut:

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatnya Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
2	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara Baku kategori A
	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Tingkat Ketersediaan Arsip

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 mencerminkan rencana kerja dan kegiatan dalam rangka mencapai misi tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2026 menguraikan perencanaan untuk pencapaian target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitas yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran strategis akan dijadikan parameter / tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi, misi serta sasaran dan pendanaan kegiatan maupun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Adapun komponen program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Terwujudnya Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk memperkuat budaya literasimelalui :

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN dengan Kegiatan :

- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO dengan kegiatan :

- Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional melalui :

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP dengan Kegiatan :

- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP dengan Kegiatan :

- Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun;
- Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota;
- Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota;
- Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP dengan kegiatan :

- Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

Serta program penunjang yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun rincian Program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel TC.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Data Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	5	7	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Kukar	11.09	14,100,000,000		11.45	7,350,000,000
	2.23.02.2.01	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	Kukar	7.88	3,750,000,000		8.21	3,450,000,000
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	3	250,000,000		3	250,000,000

2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kukar	10	1,300,000,000	Mengakomodir hasil usulan Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah tentang pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan digital	5	1,000,000,000
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Kukar	48	250,000,000		48	250,000,000
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	6	200,000,000		6	200,000,000
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	100	300,000,000		100	300,000,000
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Kukar	2	200,000,000		2	200,000,000
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kukar	52,965	500,000,000		52,965	500,000,000

	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kukar	1500	250,000,000		1500	250,000,000
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Kukar	2	500,000,000		2	500,000,000
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	Kukar	5	10,350,000,000		5	3,900,000,000
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kukar	3	150,000,000		3	150,000,000
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kukar	3	300,000,000		3	300,000,000
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	21	9,450,000,000	Mengakomodir hasil usulan Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah tentang pembangunan gedung perpustakaan desa/kelurahan	6	3,000,000,000

	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kukar	12	200,000,000		12	200,000,000
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kukar	4	250,000,000		4	250,000,000
2	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Kukar	100	1,050,000,000		100	1,050,000,000
	2.23.03.2.01	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Naskah Kuno	Kukar	36	600,000,000		41	600,000,000
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Kukar	200	400,000,000		200	400,000,000
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kukar	5	200,000,000		5	200,000,000

	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Kukar	6553	450,000,000		8553	450,000,000
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	2000	300,000,000		2000	300,000,000
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	2000	150,000,000		2000	150,000,000
3	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	Kukar	100	2,000,000,000		100	2,000,000,000
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Kukar	493685	1,200,000,000		493685	1,200,000,000
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kukar	100000	200,000,000		100000	200,000,000
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kukar	100000	200,000,000		100000	200,000,000
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	1	800,000,000		1	800,000,000

	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Kukar	60779	400,000,000		60829	400,000,000
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kukar	50	400,000,000		50	400,000,000
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memasukan arsip dalam dalam SIKN melalui JIKN	Kukar	59	400,000,000		59	400,000,000
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	7	400,000,000		7	400,000,000
4	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Kukar	100	625,000,000		100	625,000,000
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Kukar	500	150,000,000		500	150,000,000

2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kukar	500	150,000,000		500	150,000,000
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai NSPK		500	100,000,000		500	100,000,000
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kukar	500	100,000,000		500	100,000,000
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan dengan NSPK	Kukar	501	200,000,000		501	200,000,000
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	1	100,000,000		1	100,000,000

	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	500	100,000,000		500	100,000,000
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	Kukar	500	100,000,000		500	100,000,000
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	500	100,000,000		500	100,000,000
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang ditemukan setelah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	Kukar	1	75,000,000		1	75,000,000
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Kukar	1	75,000,000		1	75,000,000
5	2.24.00	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Kukar	100	150,000,000		100	150,000,000

	2.24.04.2.01	<i>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</i>	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	kukar	43	150,000,000		53	150,000,000
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	10	150,000,000		10	150,000,000
6	2.24.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kukar	73.5	23,466,718,194		74	23,466,718,194
	2.24.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kukar	11	1,000,000,000		11	1,000,000,000
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	3	450,000,000		3	450,000,000
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	3	50,000,000		3	50,000,000
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	2	150,000,000		2	150,000,000

	2.24.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kukar	1	50,000,000		1	50,000,000
	2.24.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kukar	1	250,000,000		1	250,000,000
	2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	1	50,000,000		1	50,000,000
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kukar	14	11,328,286,537		14	11,328,286,537
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kukar	85	11,128,286,537		85	11,128,286,537
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	1	25,000,000		1	25,000,000

2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kukar	12	150,000,000		12	150,000,000
2.24.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	1	25,000,000		1	25,000,000
2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kukar	3	137,000,000		3	137,000,000
2.24.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	1	25,000,000		1	25,000,000
2.24.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kukar	1	82,000,000		1	82,000,000
2.24.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	1	30,000,000		1	30,000,000
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kukar	2	1,075,000,000		2	1,075,000,000

2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kukar	1	300,000,000		1	300,000,000
2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kukar	25	375,000,000		25	375,000,000
2.24.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	130	400,000,000		130	400,000,000
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	9	4,116,000,000		9	4,116,000,000
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kukar	1	200,000,000		1	200,000,000
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kukar	1	1,516,000,000		1	1,516,000,000
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kukar	1	400,000,000		1	400,000,000
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kukar	1	150,000,000		1	150,000,000

	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kukar	1	350,000,000		1	350,000,000
	2.24.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kukar	1	400,000,000		1	400,000,000
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	350	550,000,000		350	550,000,000
	2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	1	250,000,000		1	250,000,000
	2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kukar	1	300,000,000		1	300,000,000
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kukar	12	4,110,431,657		12	4,110,431,657
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	0	-		0	-
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kukar	12	586,091,705		12	586,091,705

	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kukar	12	3,524,339,952		12	3,524,339,952
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kukar	140	1,700,000,000		140	1,700,000,000
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kukar	6	300,000,000		6	300,000,000
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kukar	6	300,000,000		6	300,000,000
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kukar	120	300,000,000		120	300,000,000
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kukar	8	800,000,000		8	800,000,000
JUMLAH						41,391,718,194			34,641,718,194

BABV

PENUTUP



a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2026 adalah kegiatan atau sub kegiatan yang mendukung digitalisasi layanan dibidang perpustakaan dan kearsipan. Juga sebagai upaya jawaban atas tuntutan zaman atas teknologi dan informasi sudah selayaknya jika digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan harus segera diwujudkan. Tetapi jika ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan maka inovasi dan kreatifitas sangat diperlukan demi terwujudnya digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam Dokumen Rancangan Renja Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini terdapat analisis kebutuhan dana/anggaran yang akan dimanfaatkan

untuk melaksanakan 6 (enam) program yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan/sub kegiatan. Baik *output* maupun *outcome* yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya rencana kerja yang terukur diharapkan target capaian indikator kinerja kunci Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat tercapai. Dalam pencapaian target juga harus didukung penuh dengan dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan Kearsipan Daerah dan Gerakan Budaya Baca Masyarakat serta menciptakan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 21 Maret 2025.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN¹ DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji Tenggara

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : diarpuskukar@gmail.com Kode Pos 75514

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P-1/SET.DIARPUS/000.7.6.1/01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka bagi setiap Instansi Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) masing-masing SKPD;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu adanya perubahan sistematis dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026.

Pasal 1...

Pasal 1

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Dokumen Perencanaan Tahun 2026.

Pasal 2

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 3 Januari 2025



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : P-1/SET.DIARPUS/000.7.6.1/01/2025

TANGGAL : 3 Januari 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN
ANGGARAN 2026 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

1. Pengarah

:

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2. Penanggung Jawab

:

Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Ketua

:

Hendra Wahyudi, S.Sos. (Perencana Ahli Muda)
4. Anggota

:

1. Kabid. Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip

2. Kabid. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

3. Kabid. Pembinaan Perpustakaan

4. Kabid. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

5. Hj. Rabiatul Isnaniah, S.E.

6. Laila Jamilah

7. Edwin, S.E.

8. Andri Asfiansyah

9. Nuryana

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

